

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung antara lain :

1. Mengembangkan dan mengkonfirmasi standar pendidikan nasional seperti dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional No.19/2005, sebagai landasan evaluasi pendidikan, peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan, peningkatan sumber daya pendidikan , akreditasi, dan jaminan kualitas.
2. Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan, dana subsidi masih diperlukan yang akan menghubungkan ke unit-unit pendidikan, bila mutunya di bawah standar nasional, misalnya dana untuk pembelajaran, alat-alat dan fasilitas belajar, textbook, dan dana untuk membayar guru yang memiliki kelebihan mengajar. Subsidi untuk biaya operasional dan perawatan pendidikan juga akan menghubungkan ke tempat yang tepat untuk mempercepat upaya pemerataan mutu pendidikan.
3. Peningkatan Infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Ini adalah upaya strategis bagi semua unit, tingkat dan jenis pendidikan yang akan dilaksanakan dengan memberi subsidi bagi unit pendidikan yang membutuhkan untuk membeli

atau memperbaiki dan merawat infrastuktur dan fasilitas pendidikan.

4. Melakukan evaluasi pendidikan melalui ujian nasional sebagai badan yang mandiri, yang disebut Badan Standar Pendidikan Nasional (BSPN). Ujian akan mengukur kompetensi siswa berdasarkan standar yang telah disetujui secara nasional. Nilai ujian tidak akan digunakan sebagai satu-satunya alat ukur untuk menentukan keberhasilan mereka pada saat akhir pendidikan, namun akan digunakan sebagai alat untuk memetakan, menganalisa, dan penanda mutu pendidikan.
5. Pemerintah Daerah Lampung telah mengeluarkan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program prioritas pembangunan sumber daya manusia yang sebagian besar program tersebut adalah program pendidikan. Namun dari lima kegiatan aksi yang ada pada RENSTRA tersebut hanya satu kegiatan saja yang sesuai dengan program peningkatan mutu pendidikan yang telah terealisasi oleh pemerintah yaitu bantuan sarana sekolah SD,SLTP, dan SMU, dengan program prioritasnya yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kependidikan menengah dan umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Lampung khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai pelaksana teknis pembangunan pendidikan, sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan seharusnya

dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada sektor dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Perlunya peningkatan alokasi anggaran pendidikan untuk pembangunan sektor pendidikan khususnya pembangunan pendidikan untuk SMU Negeri karena SMU Negeri adalah milik pemerintah dan memperoleh dana pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah.
3. Perlunya peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan melalui peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru dilakukan melalui peningkatan tingkat pendidikan guru dengan jenjang pendidikan setara Sarjana. Hanya dengan peningkatan mutu seta penghargaan yang layak terhadap profesi guru dapat dibangun suatu sistem pendidikan yang menunjang lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan.
4. Pembangunan sektor pendidikan harus sesuai dengan perencanaan, arah dan tujuan sasaran pendidikan nasional sebagai upaya pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

